



Pemkot Segera Perketat Operasional Otoped Listrik di Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah mematangkan aturan soal operasional persewaan otoped listrik di sepanjang kawasan Malioboro. Melalui upaya tersebut, polemik yang seringkali timbul serta berujung keluhan wisatawan bakal diredam.

Keluhan wisatawan terkait aktivitas penyewa otoped di Malioboro muncul berulang kali dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Jumlahnya yang terlalu banyak dan terkadang memenuhi trotoar, hingga pengendara yang terkesan ugol-ugalan,

menjadi sorotan tajam.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, dapat memahami hal tersebut, di mana aktivitas skuter elektrik seringkali dikeluhkan pelanggan. Alhasil, aktivitas otoped listrik sedang dalam proses penertiban selaras dengan penataan Malioboro sejak awal Februari lalu.

Pihaknya pun sudah menjalin komunikasi dengan seluruh pengelola persewaan otoped listrik di Malioboro, dengan menggelar *focus group discussion* (FGD) bersama pihak-pihak terkait, beberapa waktu

lalu. Menurutnya, para penyedia jasa pun tak keberatan untuk ditata:

"Makanya sekarang sedang kita susun aturannya, kemarin kita kan FGD, sudah selesai. Jadi, operasionalnya diatur secara spesifik," ucap Heroe, Rabu (16/3).

Menurutnya, pengaturan tersebut meliputi jumlah skuter listrik yang beroperasi dalam satu waktu, pembatasan jam aktivitas, hingga rute yang boleh dilalui penyewa. Dengan begitu, diharapkan, para wisatawan, atau pejalan kaki di Malioboro tak ter-

ganggu keberadaan mereka.

"Nanti akan ada aturan jamnya, sehingga tidak bisa lagi sembarangan. Termasuk rute dan jalur untuk skuter listrik, mana yang boleh, mana yang tidak," urainya.

"Sekarang masih kita tunggu finalisasinya. Sudah sampai Dishub (Dinas Perhubungan) dan Asek (Asisten Sekda), itu tinggal dilihat dari aspek hukum dan segala macam, ya, baknya seperti apa itu nan-

● kehalaman 15

Pemkot Segera

● Sambungan Hal 9

ti," imbuh Wawali.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pun menandaskan, pihaknya siap mengambil langkah tegas jika penyedia jasa tidak bisa mengontrol aktivitas penyewanya. Bahkan, ia mengan-

cam bakal memberhentikan kegiatan persewaan otoped listrik di kawasan Malioboro.

"Pengelolanya yang kena, bisa saya stop itu. Mereka yang menyewakan, wisatawan bisa menggunakan itu (otoped listrik) karena mendapat akses sewa," ujarnya.

Selain melawan arus, Haryadi pun melihat langsung para penyewa otoped listrik

melaju dengan kecepatan maksimal di lorong-lorong pertokoan. Menurutnya, tingkah semacam itu jelas mengganggu pejalan kaki yang ingin menikmati atmosfer Malioboro, terutama di malam hari.

"Sekarang sudah dibatasi, maksimal 200 yang beroperasi. Sebenarnya, sepanjang dia pelan-pelan, dipakai di troto-

ar, nggak masalah. Tapi, kalau rombongan, terus ngebut, ya sangat mengganggu pejalan kaki," ulasnya.

"Jadi, harus diberi nomor lambung 1-200, jangan lebih. Tapi, jangan terus diakali, misal nomor 26-nya ada empat, kalau sampai ketahuan, ya kita sanksi. Sebenarnya kita sudah berikan kelonggaran," tambah Haryadi. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005